



# **AKUNTABILITAS PEGAWAI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTERGRASI (SRIKANDI) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**Ni Komang Surya Widayani<sup>1\*</sup>, Lilik Antarini<sup>2</sup>, I Wayan Sudemen<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Indonesia

\*Email correspondence: [widaayani9@gmail.com](mailto:widaayani9@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali mulai menerapkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintergrasi sejak tahun 2023 pada bulan Oktober. Berdasarkan observasi langsung di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bali pada 16-19 Desember 2024, adanya masalah akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Terdapat tiga permasalahan utama: Pertama, kurangnya pertanggungjawaban terkait pemahaman penggunaan aplikasi, terlihat dari minimnya pengetahuan pegawai. Kedua, tidak adanya pertanggungjawaban langsung dari pegawai BAWASLU Provinsi Bali dalam mengatasi serangan peretas yang menyebabkan Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses. Ketiga, belum adanya pertanggungjawaban terkait keterbatasan fitur aplikasi, khususnya tidak adanya fitur notifikasi untuk surat masuk. Permasalahan tersebut mendasari pentingnya dilakukan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Penelitian menggunakan teori Akuntabilitas menurut Sheila Elwood yaitu, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Satuan kajian dan informan penelitian ini berjumlah 4 informan terdiri dari 2 orang pegawai, kepala bagian, dan kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian akuntabilitas pegawai BAWASLU Provinsi Bali dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI menunjukkan hasil yang bervariasi di lima aspek. Akuntabilitas hukum sudah baik dengan adanya landasan regulasi yang kuat. Akuntabilitas kejujuran terlihat melalui monitoring yang mengidentifikasi kekurangan pada fitur pengguna. Pada akuntabilitas proses, meski aplikasi meningkatkan efisiensi, masih terdapat kendala keamanan akibat serangan peretas. Akuntabilitas program dilaksanakan secara bertahap dengan laporan berjenjang dan diukur melalui keberhasilan verifikasi surat dan penerapan TTE. Akuntabilitas kebijakan ditandai dengan sistem pertanggungjawaban terstruktur dari tingkat provinsi hingga pusat yang menunjukkan komitmen terhadap kelancaran operasional.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Pegawai; Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi (SRIKANDI); Kearsipan; BAWASLU

## ARTICLE INFO

Received February 26, 2025

Revised April 11, 2025

Published May 30, 2025



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Warmadewa University

## ABSTRACT

*The Bali Provincial Election Supervisory Body has started implementing an integrated dynamic archiving information system application since October 2023. Based on direct observation at the Bali Provincial Election Supervisory Body (BAWASLU) on December 16-19, 2024, there was a problem of employee accountability in using the SRIKANDI Application. There are three main problems: First, the lack of accountability related to understanding the use of the application, as seen from the lack of employee knowledge. Second, there is no direct accountability from Bali Provincial BAWASLU employees in dealing with hacker attacks that cause the SRIKANDI Application to be inaccessible. Third, there is no accountability related to the limitations of the application features, especially the absence of a notification feature for incoming mail. These problems underlie the importance of conducting research to determine employee accountability in using the SRIKANDI Application at the Bali Provincial Election Supervisory Body. The study uses the Accountability theory according to Sheila Elwood, namely, Legal and Honesty Accountability, Process Accountability, Program Accountability, and Policy Accountability. The research method uses qualitative descriptive. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data sources for this study are primary data and secondary data. The study unit and informants of this research consisted of 4 informants consisting of 2 employees, the head of the section, and the head of the secretariat of the Bali Province Bawaslu. The data analysis technique used was through data condensation, data presentation, drawing and verifying conclusions. The results of the research on the accountability of Bali Province BAWASLU employees in using the SRIKANDI Application showed varying results in five aspects. Legal accountability is good with a strong regulatory basis. Honesty accountability is seen through monitoring that identifies deficiencies in user features. In process accountability, although the application increases efficiency, there are still security constraints due to hacker attacks. Program accountability is implemented in stages with tiered reports and is measured through the success of letter verification and TTE implementation. Policy accountability is characterized by a structured accountability system from the provincial to central levels that shows a commitment to smooth operations.*

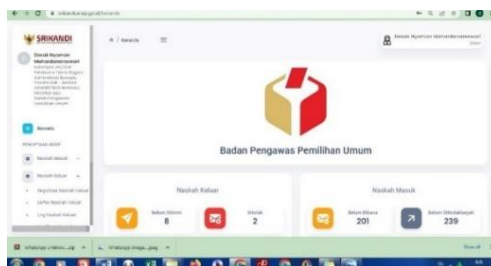
**Keywords:** *Accountability; Employees; Integrated Dynamic Archiving Information system (SRIKANDI); Archives; BAWASLU*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki tiga tanggung jawab utama yaitu perlindungan, pembangunan, dan pelayanan publik. Bentuk tanggung jawab yaitu dari pelayanan publik adanya pelayanan administratif yang diberikan berupa dokumen penting atau resmi yang masyarakat butuhkan (Moch Luthfil Chakim et al., 2024). Saat ini dalam sektor pemerintahan sudah banyak menerapkan pertanggungjawaban dalam kegiatan pelayanan pengarsipan (Puspitadewi, 2019). Pelayanan administratif juga sudah banyak menggunakan *electronic government (e-gov)* sehingga mudah, cepat, dan dapat dilakukan dimana saja, seperti dalam proses pengarsipan

data (Azhari et al., 2022). Arsip merupakan catatan yang memiliki fungsi untuk memori yang digunakan dalam suatu instansi baik itu pemerintahan atau organisasi (Nyfantoro et al., 2019). Menurut (Nyfantoro et al., 2019) tujuan dari adanya arsip ini untuk mengumpulkan informasi yang akan mempermudah temu kembalinya. Akuntabilitas sebagai hal yang wajib untuk menanggapi adanya permintaan informasi ataupun pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, menjelaskan dari sebuah tindakan yang salah dari seseorang, tindakan dari suatu badan hukum atau bisa oleh pimpinan kolektif dari suatu organisasi (Moch Luthfil Chakim et al., 2024).

Salah satu lembaga pemerintahan yang menggunakan *electronic government (e-gov)* untuk kebutuhan pengarsipan secara digital yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Bawaslu melakukan tugas dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik (Lestari, 2023). Sistem kearsipan digital yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali menggunakan aplikasi yang bernama SRIKANDI atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi. Sistem informasi kearsipan dinamis terintergrasi yaitu aplikasi langkah pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas kearsipan (Millenia & Tua, 2023). Serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disebut dengan SPBE. Adanya aplikasi SRIKANDI ini pada sektor pemerintahan seseorang dapat mengontrol sistem pengarsipan. Sehingga berfungsi dengan baik dan efisien untuk menciptakan penyampaian layanan publik yang cepat dan aman (Millenia & Tua, 2023).



**Gambar 1. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi (SRIKANDI)**

Sumber: Akun Admin SRIKANDI, 2025

Tujuan penggunaan aplikasi SRIKANDI dapat menghemat penggunaan kertas untuk pembuatan surat masuk, surat keluar, dan surat penting lainnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali (Adra & Permana, 2023). Meskipun pengarsipan sudah menggunakan aplikasi SRIKANDI, khususnya oleh pegawai di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali namun masih terdapat kendala berdasarkan observasi langsung di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Bali pada 16-19 Desember 2024, adanya masalah akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Terdapat tiga permasalahan utama: Pertama, kurangnya pertanggungjawaban terkait pemahaman penggunaan aplikasi, terlihat dari minimnya pengetahuan pegawai. Kedua, tidak adanya pertanggungjawaban langsung dari pegawai BAWASLU Provinsi Bali dalam mengatasi serangan

peretas yang menyebabkan Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses Ketiga, belum adanya pertanggungjawaban terkait keterbatasan fitur aplikasi, khususnya tidak adanya fitur notifikasi untuk surat masuk, Permasalahan tersebut mendasari pentingnya dilakukan penelitian untuk mengetahui akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Oleh karena itu, melihat permasalahan tersebut diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Pada penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas menurut Ndraha (2003) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebagai asas yang berarti, bukan hanya aktor pemerintahan melainkan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas juga kewajibannya (Nengsih et al., 2019). Istilah akuntabilitas menurut Dubnick (1998) berasal dari bahasa Prancis lama yaitu "*compets a render*" yang memiliki arti yaitu memberikan laporan, maka dari itu menjadi wajar apabila definisi dari standar mengenai akuntabilitas menekankan pada informasi dan sanksi (Raba, 2020). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas menurut Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002:226-227) memiliki empat indikator yang diantaranya, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, akuntabilitas hukum dan kejujuran ini relevan dengan tidak melakukan dan juga menyalahgunakan jabatan publik. Sedangkan dalam akuntabilitas kejujuran ini berkaitan dengan tidak adanya penyalahgunaan jabatan serta praktik organisasi yang dijalankan harus jujur. Dalam akuntabilitas proses ini ditunjukkan oleh layanan publik yang juga ditawarkan agar cepat, efisien, dan tentunya terjangkau. Akuntabilitas program dapat menjadi persyaratan bahwa sebuah program yang dibuat oleh organisasi terlihat berkualitas tinggi dan mencapai visi yang diinginkan. Akuntabilitas kebijakan dapat berkaitan dengan sebuah organisasi bertanggung jawab dengan keputusan dan kebijakan yang sudah dibuat.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan data kualitatif, yang tidak dapat dinilai atau dijumlahkan. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan dalam menjawab pembahasan dari penelitian yang bersifat kompleks dan subjektif (Ardyan et al., 2023). Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) dalam (Mardawani 2020) adalah langkah yang paling strategis untuk melakukan penelitian, karena bagian dari sebuah penelitian yaitu mendapatkan data (Mardawani, 2020). Teknik pengumpulan data metode kualitatif biasanya dilakukan dengan teknik, observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian yang dilakukan kepada perilaku manusia, proses kerja, peristiwa-peristiwa alam. Dalam pelaksanaan observasi pada penelitian ini yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Kemudian dalam melakukan observasi menggunakan alat bantu yaitu, buku catatan dan juga *handphone* untuk menunjang kegiatan

observasi. Pada penelitian ini wawancara terstruktur dan dilakukan melalui tatap muka dengan pihak informan. Wawancara terstruktur digunakan untuk teknik pengumpulan data, apabila peneliti sudah mengumpulkan data yang sudah diketahui dengan pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Teknik dokumentasi dalam metode penelitian kualitatif ini penting untuk dilakukan karena merupakan sumber-sumber yang stabil dan mendorong, serta bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara (Ekasari, 2020).

Terdapat dua sumber data pada penelitian ini, yaitu sumber Data primer dikumpulkan melalui wawancara, eksperimen, observasi langsung (Handayani, 2023) data primer berupa hasil wawancara terhadap beberapa informan, dan sumber Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2023) dalam (Handayani, 2023) yaitu sumber data yang memberikan data kepada pelaku atau peneliti yang sedang melakukan pencarian data (Handayani, 2023). Tujuan dari sumber data sekunder adalah untuk mendukung informasi penelitian. data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen mengenai penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Bawaslu Provinsi Bali. Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang akan diperlukan dalam melakukan penelitian (Sayidah, 2018). Informan dalam penelitian yang diantaranya meliputi, pegawai dibagian administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, pegawai bagian data dan informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Kepala Bagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam (Putri, 2024). Kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, dan juga pemusatan perhatian pada penyederhanaan, atau pengabstrakan data-data yang ada saat melakukan proses pencatatan lapangan (Wada et al., 2024). Pada proses penyajian data menurut Miles dan Huberman (2024) dalam (Wada et al., 2024), mengatakan penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Simpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa temuan baru yang dimana sebelumnya belum pernah ada, temuan biasanya dapat berupa deskripsi ataupun gambaran dari suatu obyek yang sebelumnya masih menjadi tanda tanya, sehingga apabila diteliti menjadi jelas (Wada et al., 2024).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,

#### **Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Akuntabilitas hukum oleh pegawai dalam penggunaan Aplikasi Srikandi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) mempunyai landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dengan tingkat tertinggi, aplikasi ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



(SPBE). Adanya penguatan regulasi dilakukan melalui Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022 yang secara spesifik mengatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam konteks yang lebih spesifik, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2021 yang memuat Pedoman Penerapan Aplikasi SRIKANDI. Peraturan ini menjadi panduan teknis operasional dalam penggunaan aplikasi tersebut di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Khusus untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, institusi ini telah mengambil langkah lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Instruksi Ketua (SK) dengan Nomor 8 Tahun 2023. SK ini memiliki fungsi sebagai instrumen hukum internal yang menjadi dasar perintah kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali dalam menggunakan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis mereka. Berdasarkan adanya peraturan terkait penggunaan Aplikasi SRIKANDI dapat dinilai adanya pertanggungjawaban pegawai dalam menggunakan Aplikasi SRIKANDI sesuai dengan SOP dan regulasi yang ditetapkan oleh BAWASLU Provinsi Bali. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) dapat menjadi komitmen BAWASLU Provinsi Bali dalam mengimplementasikan sistem kearsipan digital yang terintegrasi sesuai dengan arahan pemerintah pusat. dengan adanya dasar hukum yang menjadi landasan untuk pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI mampu menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana akuntabilitas hukum serta sebagai acuan dan pedoman pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugas untuk penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

### **Akuntabilitas Kejujuran**

Untuk menilai akuntabilitas kejujuran disini dapat dilihat dari adanya audit atau pemantauan rutin yang dilakukan untuk memastikan adanya kejujuran dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Bawaslu Provinsi Bali. Dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Bawaslu Provinsi Bali tentunya ada pemantauan atau audit yang dilakukan oleh pusat melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang dimana hasil monev tersebut dapat menilai pemahaman pengguna yaitu seluruh staf sebagai pencipta surat di Aplikasi SRIKANDI karena semua staf diharapkan agar bisa menggunakan Aplikasi SRIKANDI dan menguasai langsung. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada 16 Desember 2024 yang bertempat di Bawaslu Kabupaten Tabanan. Tujuan utama dari monitoring dan evaluasi (monev) tersebut adalah untuk melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan, khususnya terkait dengan implementasi Aplikasi SRIKANDI versi 3.0.



**Gambar 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Terkait Implementasi Aplikasi SRIKANDI**

Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan gambar di atas kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan pada 16 Desember 2024 yang bertempat di BAWASLU Kabupaten Tabanan. Berdasarkan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAWASLU RI ini memberikan hasil bahwa adanya kekurangan dalam pengelolaan *user* atau pengguna aplikasi. Secara spesifik, dari hasil monev tersebut ditemukan bahwa sistem hanya mencakup pendaftaran untuk beberapa kategori pengguna tertentu, yaitu ketua, anggota, kepala sub bagian (subag), dan pengelola. Tetapi masih adanya kekosongan yang signifikan, terdapat fitur *user* staf yang belum ditambahkan ke dalam menu pengguna Aplikasi SRIKANDI. Melihat hal tersebut, masih diperlukan adanya penyempurnaan dalam hal manajemen pengguna sistem untuk memastikan semua level staf dapat mengakses dan menggunakan aplikasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat menjadi tolak ukur akuntabilitas kejujuran menurut teori akuntabilitas Sheila Elwood pada penggunaan Aplikasi SRIKANDI oleh pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

### **Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses merupakan pertanggungjawaban dari suatu organisasi terhadap layanan yang ditawarkan seperti lebih efisien dalam proses penginputan surat masuk di Aplikasi SRIKANDI. Akuntabilitas proses oleh pegawai pada penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dapat diukur dengan indikator kecepatan dan efisiensi proses, partisipasi dan keterlibatan pengguna, serta sarana dan prasarana yang mendukung Aplikasi SRIKANDI.

### **Aspek Efisiensi**

Diterapkannya Aplikasi SRIKANDI, terjadi peningkatan efisiensi yang sangat berarti dalam proses administrasi. Aplikasi ini memungkinkan adanya digitalisasi proses penginputan surat yang lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini tidak hanya menghemat waktu secara signifikan tetapi juga mempermudah dan pengelolaan dokumen. Dalam aspek efisiensi terkait kelebihan dari menggunakan Aplikasi SRIKANDI, yaitu dapat menghemat waktu dalam penginputan surat masuk dan surat keluar. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI telah membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi surat-menyurat di BAWASLU Provinsi Bali. Sebelum menggunakan Aplikasi SRIKANDI, proses pengelolaan surat masuk masih dilakukan secara manual, yang mana memerlukan waktu yang cukup panjang, terutama dalam pencarian penandatanganan surat. Sistem manual ini dinilai kurang efisien karena memerlukan beberapa tahapan yang memakan waktu dalam penginputan dan pemrosesan surat. Transformasi dari sistem manual ke sistem digital melalui Aplikasi SRIKANDI ini mencerminkan upaya modernisasi administrasi perkantoran yang sejalan dengan tuntutan era digital. Efisiensi waktu yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas pegawai dan pelayanan yang lebih optimal di BAWASLU Provinsi Bali.

### **Aspek Partisipasi dan Keterlibatan Pengguna**

Dalam pengoperasian Aplikasi SRIKANDI tentu perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai mengenai cara penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan Aplikasi SRIKANDI versi 3.0 sudah dilaksanakan melalui program bimbingan teknis

(bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 9 hingga 11 Desember 2024, dan bertempat di Bigland Hotel Internasional & Convention Hall. Bimbingan teknis ini dihadiri oleh perwakilan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai implementasi Aplikasi SRIKANDI versi terbaru. Keterlibatan pegawai dalam bimbingan teknis tersebut, Bawaslu Provinsi Bali ikut berpartisipasi dengan mengirimkan dua orang staf administrasi sebagai perwakilan untuk mengikuti bimbingan teknis



**Gambar 3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Impelmentasi Aplikasi SRIKANDI**

Sumber: Laporan Kegiatan Bawaslu Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan, dalam pengoperasian Aplikasi SRIKANDI tentu perlu adanya sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai mengenai cara penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan Aplikasi SRIKANDI versi 3.0 sudah dilaksanakan melalui program bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keterlibatan pegawai dalam bimbingan teknis tersebut, BAWASLU Provinsi Bali ikut berpartisipasi dengan mengirimkan dua orang staf administrasi sebagai perwakilan untuk mengikuti bimbingan teknis. Hal ini menunjukkan komitmen BAWASLU Provinsi Bali dalam meningkatkan pengetahuan pegawainya dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya bimbingan teknis, dapat menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana akuntabilitas proses dalam aspek partisipasi dan keterlibatan pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Dengan mengikuti bimbingan teknis tersebut dapat menunjukkan adanya pertanggungjawaban pegawai dalam upaya pembangunan kapasitas yang terstruktur.

### **Aspek Sarana dan Prasarana**

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada  
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali**

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	5 unit	Untuk proses penginputan surat
2	Printer	2 buah	Untuk proses pencetakan surat
3	Scanner	2 buah	Untuk proses pemindaian dokumen
4	Jaringan Nirkabel (wifi)	2 unit	Sebagai koneksi internet
5	Meja Panjang	5 buah	Sebagai pendukung tempat peletakan laptop
6	Kursi	5 buah	Sebagai pendukung peningkatan produktivitas pegawai

Sumber : Penelitian di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, 2024



Berdasarkan tabel tersebut adanya sarana dan prasarana yang memadai tentunya dapat mendukung terwujudnya pelayanan yang *akuntable* dalam rangka menciptakan kearsipan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana dapat digunakan untuk penunjang dalam mengoperasikan Aplikasi SRIKANDI oleh pegawai dalam bentuk alat maupun media. Adapun sarana dan prasarana dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali terdiri dari jenis dan jumlah ketersediaan alat dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Meliputi Laptop berjumlah 5 Unit yang digunakan untuk proses peninputan surat pada Aplikasi SRIKANDI. Printer untuk proses pencetakan surat apabila diperlukan surat dalam bentuk cetak sejumlah 2 Buah. Scanner adalah alat untuk pemindaian dokumen sejumlah 2 Buah. Jaringan Nirkabel (wifi) yang digunakan sebagai pendukung koneksi internet di kantor. Sedangkan alat pendukung bagi pegawai dalam peningkatan produktivitas kerja ada meja panjang untuk pendukung tempat peletakan laptop sejumlah 5 buah, kursi 5 buah, dan adanya ruangan yang tersebar sebagai pendukung dalam produktivitas pegawai untuk menggunakan Aplikasi SRIKANDI serta sebagai sarana pendukung peningkatan kinerja pegawai pada BAWASLU Provinsi Bali.

### **Akuntabilitas Program**

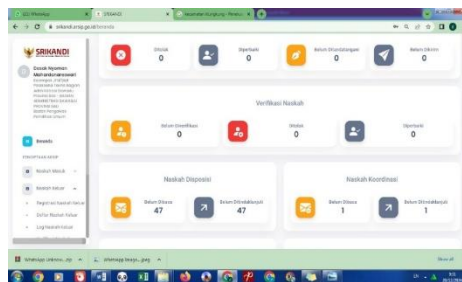
Akuntabilitas program untuk menciptakan pertanggungjawaban program dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI ini dapat memiliki target atau capaian yang sudah dilakukan. Adapun indikator yang mampu menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas program yaitu, mempertanggungjawabkan program, hasil dari program, dan efektivitas penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

### **Aspek Pertanggungjawaban Program**

Adanya pertanggungjawaban dari hasil program yang sudah berjalan, seperti adanya pelaporan terkait evaluasi dari kinerja program Aplikasi SRIKANDI. Terdapat mekanisme pertanggungjawaban program Aplikasi SRIKANDI dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan pertama dimulai dengan peran operator atau admin yang bertanggung jawab mengelola Aplikasi SRIKANDI, di mana mereka bertugas menyusun laporan terkait hasil dan evaluasi penggunaan aplikasi di Bawaslu Provinsi Bali. Kemudian, laporan tersebut menjadi bahan diskusi dengan atasan atau pimpinan dari Bawaslu Provinsi Bali untuk mendapatkan arahan dan evaluasi lebih lanjut. Setelah melalui proses pembahasan, pimpinan yang memiliki kewenangan akan menyampaikan laporan evaluasi program kepada Bawaslu Republik Indonesia.

### **Aspek Hasil Program**

Dalam indikator akuntabilitas program hasil dari program Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) ini mengacu pada capaian atau *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program dalam konteks pengukuran akuntabilitas program. Hasil dari capaian program Aplikasi Srikandi keberhasilan implementasi Aplikasi Srikandi terutama terlihat pada proses penginputan surat masuk. Indikator keberhasilan ini dapat diukur dari dua aspek diantaranya, yaitu keberhasilan verifikasi surat dan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE).



**Gambar 4. Tampilan Akun Admin Pegawai di Aplikasi SRIKANDI**

Sumber: Admin Operator Aplikasi SRIKANDI di Bawaslu Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat memberikan gambaran terkait akun admin Aplikasi SRIKANDI yang dimana pada beranda dapat meliputi gambaran sistem verifikasi naskah terdapat tiga menu yaitu, menu belum diverifikasi, ditolak, dan diperbaiki. Selain itu, terdapat menu naskah yang didisposisi terdapat dua pilihan yaitu menu belum dibaca, dan menu belum ditindaklanjuti. Menu lainnya terdapat menu naskah koordinasi yang terdapat dua pilihan yaitu menu naskah belum dibaca dan naskah yang ditindaklanjuti.

### **Aspek Efektivitas**

Dari penggunaan Aplikasi SRIKANDI oleh pegawai Bawaslu Provinsi Bali dalam proses pencatatan dan juga pengelolaan arsip yang menjadi lebih terstruktur dan jauh lebih efektif. Dengan menggunakan Aplikasi SRIKANDI dapat dikatakan efektif karena bermanfaat dari segi penginputan surat menyurat, pengiriman surat kepada pimpinan, penandatanganan surat, pendisposisian surat kepada pegawai, dan juga verifikasi surat. Selain itu efektif karena mampu membantu dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Aplikasi SRIKANDI adalah Aplikasi yang membutuhkan koneksi internet yang memadai dalam penginputan suratnya, apabila tidak dengan koneksi yang stabil Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses oleh pegawai. Selain itu, pertanggungjawaban pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI dapat dilihat dari yang pertama, efektivitas aplikasi dalam mendukung tugas-tugas administratif pegawai, dan kedua, adanya program bimbingan teknis yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan teknologi. Terkait akuntabilitas program dalam indikator efektivitas program mampu menjadi tolak ukur dalam akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintergrasi (SRIKANDI) pada Bawaslu Provinsi Bali.

### **Akuntabilitas Kebijakan**

Dalam akuntabilitas kebijakan oleh pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI ini bertanggungjawab atas pengelolaan, pemeliharaan dari Aplikasi SRIKANDI. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali mempunyai sistem pertanggungjawaban yang jelas terkait permasalahan atau keluhan yang timbul selama penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Dimana pertanggungjawaban pertama kali dilakukan oleh Para pimpinan dari Bawaslu Provinsi Bali yang diantaranya, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi yang berjumlah lima orang, dan Kepala Bagian yang berjumlah 3 orang yang bertugas menangani dan mencari solusi apabila ada kendala atau masalah yang muncul dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, laporan akan diteruskan terkait permasalahan tersebut kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang selanjutnya akan mengirimkan laporan kepada instansi terkait di tingkat pusat, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) atau Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dengan mekanisme ini, setiap permasalahan yang terjadi akan diproses melalui proses yang terstruktur, dan tujuannya untuk memastikan bahwa setiap kendala dapat diketahui dan dicari jalan keluarnya secara sistematis. Sistem pertanggungjawaban yang terkoordinasi ini memaparkan upaya maksimal dalam menjaga kelancaran operasional Aplikasi SRIKANDI dan memberikan solusi cepat terhadap masalah yang muncul.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait akuntabilitas pegawai dalam penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan teori Akuntabilitas menurut Sheila Elwood dapat diukur dengan empat indikator diantaranya akuntabilitas hukum sudah baik, dengan penerapan sesuai landasan hukum Perpres No. 95/2018, Perpres No. 132/2022, Peraturan Kepala ANRI No. 4/2021, dan SK Bawaslu No. 8/2023. Akuntabilitas Kejujuran terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi 16 Desember 2024 yang mengidentifikasi kekurangan sistem yakni belum adanya fitur user untuk staf. Akuntabilitas Proses mencakup: Efisiensi, aplikasi meningkatkan efisiensi pengelolaan surat, meski pernah mengalami gangguan peretas pada Agustus-September 2024. Partisipasi, pegawai mengikuti bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas. Sarana prasarana sudah memadai, namun perlu pengembangan sistem keamanan Akuntabilitas Program dinilai dari pertanggungjawaban bertahap mulai dari operator hingga Bawaslu RI, keberhasilan program ditunjukkan dengan verifikasi surat dan penerapan TTE. Efektivitas dalam mempercepat proses administrasi, meski tergantung pada koneksi internet. Akuntabilitas Kebijakan memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas dan terstruktur dari pimpinan Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu RI. Secara keseluruhan, penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Bawaslu Provinsi Bali dinilai akuntabel sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut Sheila Elwood.

#### **5. REFERENSI**

- Adra, A., & Permana, I. (2023). Pemanfaatan aplikasi srikandi bagi pegawai di pusat pengembangan sumber daya manusia regional bukittinggi. *Jurnal ilmu administrasi negara (juan)*, 11(01), 1–12. <https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5807>
- Ardyan, E., Boari, Y., Yuliyani, L., Hildawan, Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Efitra, Ed.)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azhari, M. F., Yuwono, T., Ghulam Manar, D., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2022). Penggunaan Aplikasi Si D'nok Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2). ). <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi (M. Lettucia, D. Pertiwi, & T. AE, Eds.)*.
- Handayani, L. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (T. Fuadi, Ed.)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya.

- Lestari, S. S. (2023). Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengimplementasikan Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 pada. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif* (Dwi, Rasyadany, & A. Wati, Eds.). DEEPUBLISH.
- Millenia, & Tua, H. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(15), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8214031>
- Moch Luthfil Chakim, O., Nurcahyanto, H. M., & Dra Tri Yuniningsih, A. (2024b). Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy*.
- Nengsih, W., Adnan, Mf., & Eriyanti, F. (2019). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2 (1).
- Nyfantoro, F., Salim, T. A., & Mirmani, A. (2019). Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Kearsipan Terapan*, 3 (1).
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)
- Puspitadewi, I. (2019). Pengaruh Digitalisasi Perbankan Terhadap Efektivitas Dan Produktivitas Kerja Pegawai. In *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* (Vol. 5, Issue 2).
- Putri, R. (2024). Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di TPS3R Uma Asri Dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Raba, M. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian .
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D* (A. Nuryanto, Ed.). Aflabeta.
- Surat Keputusan (SK) No. 8 Tahun 2023 sebagai dasar hukum internal untuk penggunaan Aplikasi SRIKANDI Pada Bawaslu Provinsi Bali
- Undang – Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- Wada, F., Pertiwi, A., Hasiolan, M., Lestari, S., Sudipa, G., Patalatu, J., Boari, Y., Ferdinan, Puspitaningrum, Ifadah, E., & Rahman. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Sepriano & Efitra, Eds.; Pertama). PT.Sonpedia Publishing Indonesia.